

PENGAWASAN DAN PENGALOKASIAN DANA BOS

Adinda Putri Nurhaliza¹, Ismi Nida Fadilah²
adindaputri@upi.edu¹, fadilahisminidafadilah@upi.edu²

Kampus UPI di cibiru

ABSTRAK

Pendidikan memiliki peran krusial dalam kemajuan suatu bangsa dan negara. Dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangatlah penting dalam mengatasi tantangan kesetaraan dan meningkatkan mutu pendidikan. Tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat mencakup aspek pendanaan, personel, dan fasilitas. Pendidikan yang berkualitas dianggap sebagai investasi yang mahal, dan kesadaran masyarakat untuk ikut membayar biaya pendidikan dianggap sebagai amanah penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan kajian berbagai penelitian relevan dari buku dan majalah. Biaya pendidikan memainkan peran kunci dalam menentukan kualitas hasil pendidikan, sebagaimana disampaikan oleh Fatah (1998: 136), "Pendanaan pendidikan merupakan bagian penting dalam pemberian masukan pendidikan. Karena pendidikan adalah suatu proses, maka masukan yang bermutu akan menciptakan proses belajar mengajar yang bermutu sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih baik."

Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait dengan kebijakan alokasi dana, termasuk pertanyaan apakah uang tersebut dialokasikan dengan benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran beasiswa melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam perencanaan biaya, koordinasi antara administrasi sekolah dan pemerintah kota, pemahaman tentang penyaluran beasiswa, dan fleksibilitas kebijakan. Semua aspek ini menjadi bagian integral dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Kata kunci: Pendidikan, Biaya Pendidikan, Pengalokasian Dana

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan suatu bangsa dan negara. Sebab pendidikan merupakan kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing dalam kondisi kehidupan pedesaan yang semakin maju dan modern. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dan kunci terpenting demi masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik. Tanpa pendidikan yang memadai dan berkualitas, Indonesia akan semakin tertinggal dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perkembangan ekonomi negara-negara yang penduduknya berpendidikan tinggi berlangsung pesat. Pendidikan dipandang sebagai bagian penting kemajuan nasional dan sarana mewujudkan amanat konstitusi serta kesadaran pembentukan karakter bangsa. Kecerdasan masyarakat dengan sendirinya menghasilkan nuansa intelektual yang lambat laun mengarah pada kemandirian. Terciptanya pendidikan bermutu yang menuju masyarakat cerdas dan mandiri memerlukan kerangka acuan sistem pendidikan yang ditentukan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Saat ini, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik terbuka bagi semua orang. Banyak bermunculan layanan pendidikan yang menawarkan berbagai macam pendidikan yang sangat menarik dan menawarkan berbagai penawaran kepada masyarakat untuk membantu masyarakat memilih lembaga pendidikan tersebut sehingga menarik minat dan penerimaan siswa. Kandidat dapat menggunakan 4444 produk layanan pelatihan ini untuk memenuhi harapan mereka dan mencapai prestasi yang baik. (Fahriansyah dan Zubir 2015). Menurut UUD 1945, negara wajib memenuhi kebutuhan pendidikan warga negaranya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C(1): "Setiap orang berhak atas pembangunan dengan memenuhi pengetahuan dasar, kebutuhan, hak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan kemanusiaan." Pendidikan merupakan hak yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara karena merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan penting bagi kemajuan bangsa. Sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, permasalahan perekonomian dipandang penting baik pada tingkat makro (negara) maupun pada tingkat mikro (organisasi), perekonomian merupakan faktor yang harus dimiliki. Misalnya, Pemerintah Republik Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan, menetapkan alokasi anggaran pendidikan setiap tahunnya, yaitu minimal 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang juga bersifat daerah. Dewan Negara memutuskan anggaran pendidikan tahunan yang mencakup gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya di daerah. Dalam kaitannya dengan lembaga atau organisasi, sekolah menyusun anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) tahunan yang memuat perencanaan pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan operasional sekolah. Penggunaan biaya menggambarkan model pendidikan keuangan. Oleh karena itu, pendanaan di semua tingkat pendidikan sangat penting untuk menjamin terselenggaranya pendidikan. Pendidikan tidak datang tanpa biaya. Pendidikan berkualitas adalah investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat dalam membayar biaya pendidikan pada hakikatnya memberdayakan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan memberikan siswa pendidikan yang komprehensif, bimbingan dan pelatihan yang diperlukan. Penerapan peraturan pemerintah PP No. 19 Tahun 2005 berdampak pada perlunya pengembangan standar keuangan yang mencakup standarisasi biaya pendidikan, termasuk biaya operasional, biaya modal dan personel. Biaya pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas hasil pendidikan. Fatah (1998: 136) menyatakan: "Pendanaan pendidikan merupakan bagian penting dalam pemberian masukan pendidikan. Karena pendidikan adalah suatu proses, maka masukan yang bermutu akan menciptakan proses belajar mengajar yang bermutu sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Menurut pernyataan tersebut, Supriadi (2001) mengatakan bahwa "harga pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan. Beban pendidikan diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan prinsip dan program sekolah, untuk melaksanakan kegiatan sekolah (internal dan eksternal) dan untuk mengembangkan sekolah. menjadi sekolah yang bermutu tinggi, lembaga pendidikan yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran, pemerintah pusat dan daerah terus menaikkan biaya pendidikan.

Kebijakan keuangan BOS bukan tanpa kritik. Selama ini sistem alokasi dana BOS Madrasah mengabaikan banyak faktor yang menghambat tata kelola pendidikan yang baik. Saat ini pemerintah menyalurkan dana BOS berdasarkan jumlah siswa per madrasah. Dengan kata lain, jumlah peserta didik pada suatu madrasah sangat mempengaruhi BOS yang diterima suatu madrasah. Di sisi lain, jumlah guru dan pejabat di madrasah swasta secara signifikan menambah beban pegawai madrasah baik dari segi gaji, guru honorer, dan tenaga honorer. Biaya, sumbangan atau lebih tepatnya "pajak" dari orang tua juga mempengaruhi kemampuan finansial madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan. Banyak SLB yang masih mewajibkan keluarga siswa, bahkan keluarga besar, untuk membayar biaya sekolah anaknya. Di sisi lain, sekolah di masyarakat tertinggal kesulitan mencari tambahan modal untuk membiayai proses pendidikan. Oleh karena itu, kemampuan finansial madrasah untuk membiayai pendidikan berbeda-beda. Karena keterbatasan sumber daya keuangan, sekolah swasta, terutama yang jumlah siswanya sedikit, sering kali tetap menggunakan dana BOS untuk menutupi biaya pegawai, meskipun hal ini bertentangan dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, di mana penelitian ini melibatkan rangkaian studi atau kajian yang terfokus pada metode pengumpulan

data dari sumber-sumber perpustakaan. Objek penelitian dieksplorasi melalui berbagai informasi perpustakaan seperti buku, majalah ilmiah, dan brosur. Penulis menyusun tinjauan pustaka dengan meneliti berbagai tulisan ilmiah, termasuk buku, artikel, dan jurnal.

Literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kebijakan tersebut kemudian diidentifikasi melalui data primer dan sekunder. Metode penelitian ini dipilih karena dianggap efektif untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan biaya pelatihan. Dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan informasi yang ditemukan dalam buku dan jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan perencanaan yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan, kebijakan ini dilaksanakan dalam jangka pendek atau jangka panjang dan strategi strategis harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan (W.Sari et al., 2020) Untuk mendukung apa yang diatur dalam Undang-Undang No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu kebijakan yang diambil adalah program Dukungan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai pada bulan Juli 2005, program ini merupakan program pemerintah yang pada berupa pengadaan dana untuk instansi pendidikan. Biaya operasional pegawai satuan pendidikan dasar yang bertanggung jawab melaksanakan program wajib belajar. Namun, ada beberapa jenis investasi dan tunjangan karyawan tertentu yang dapat didanai dengan dana BOS. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasional bukan gaji adalah standar pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan bukan gaji untuk jangka waktu satu tahun dalam rangka pendanaan umum untuk pendidikan. agar lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. Dalam merencanakan penggunaan dana BOS, yang utama adalah menyusun RAPBS yaitu rencana mobilisasi modal pendidikan yang berasal dari berbagai sumber pendapatan disertai program kerja tahunan yang mencakup beberapa kegiatan sehari-hari dan beberapa kegiatan lain dengan rincian rencana keuangan untuk suatu tahun anggaran (Zahrudin dkk, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 69 Tahun 2009, standar biaya operasional non gaji adalah standar pengeluaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan kegiatan non gaji selama 1 tahun dari total anggaran pendidikan sehingga terselenggaranya pendidikan. unit dapat memberikan pendidikan. kegiatan pendidikan yang teratur dan berkesinambungan sesuai standar nasional pendidikan). Pembiayaan pendidikan harus dirancang secara komprehensif, cermat dan sistematis. Kesiapan finansial pendidikan mencakup aspek (1) prosedur penganggaran; (2) akuntansi keuangan; (3) distribusi; (4) investasi; dan (5) verifikasi. Salah satu faktor terpenting dalam penyusunan anggaran pendidikan menyangkut upaya, prosedur dan mekanisme. Semuanya wajib dirancang dan dilaksanakan dengan baik supaya dana dapat digunakan dengan efektif dan efisien, dialokasikan dengan baik dan tepat serta dialokasikan sesuai skala prioritas. Sehingga dapat menunjang keseluruhan proses penyelenggaraan untuk pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara hati-hati. Menteri Pendidikan Nasional dalam keputusannya Nomor 053/U/2001 menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan, termasuk BOS, harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Pertama, pemantauan adalah proses mengamati terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dalam rangka memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang telah dan sedang dilakukan sesuai dengan rencana. Menurut Syafrudin, fungsi pengawasan mencakup evaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran, termasuk kemungkinan penyimpangan dari rencana awal.

Program BOS memiliki tujuan untuk mengurangi beban keuangan pendidikan masyarakat, dan lebih khusus lagi, BOS bertujuan untuk membebaskan seluruh siswa miskin kelas 9 dasar

dari beban biaya operasional sekolah, kecuali sekolah percontohan internasional dan nasional. serta mengurangi beban operasional mendidik siswa di sekolah swasta. BOS juga bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan APK siswa, dan memberikan kesempatan yang sama bagi siswa MI/MT yang kurang mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. BOS dapat menjadi cara penting untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan (kaya dan miskin) dan antar daerah (dana BOS). Setelah 5 tahun beroperasi, Pemerintah telah merevisi tujuan, pendekatan dan arah BOS sejak tahun 2009. Program BOS tidak hanya berperan dalam menjaga angka partisipasi sekolah (APK) secara keseluruhan tetapi juga harus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar.

UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 ayat 2 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal tingkat dasar tanpa membayar biaya pendidikan. Hal inilah yang mendasari program BOS, dimana program tersebut merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memberantas buta huruf dan lain sebagainya. Untuk memahami implementasi pengelolaan dana BOS, kita harus memperhatikan 7 prinsip pengelolaan dana BOS beserta analisisnya. Dana BOS merupakan bagian dari sumber pendapatan sekolah yang harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan sekolah dan siswa. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dipastikan melalui perencanaan, akuntansi, pelaporan dan pemantauan. Hal ini bertujuan untuk:

1. Menjamin dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk dana harian sekolah, dan dana yang lebih bisa diinvestasikan atau disimpan untuk masa yang akan datang
2. Memelihara barang yang dimiliki oleh sekolah untuk meminimalisir kerusakan
3. Menjaga dan melaksanakan peraturan pengelolaan keuangan

Menurut Peraturan MENDIKNAS Nomor 69 Tahun 2009, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan sumber pendanaan guna menanggulangi biaya operasional satuan pendidikan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program wajib belajar. Dana BOS dianggap sebagai bagian integral dari anggaran pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah, dengan harapan dapat menjamin agar proses pendidikan dapat berjalan dengan efektif. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat berdampak negatif pada kualitas pembelajaran, karena lembaga pendidikan akan kekurangan dukungan finansial. Dalam konteks program BOS, dana yang diterima oleh sekolah diharapkan dikelola secara menyeluruh dan independen oleh guru dan komite sekolah. Pemahaman ini mencerminkan dukungan terhadap konsep manajemen berbasis sekolah, di mana sekolah diberdayakan melalui otonomi dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, sekaligus memberikan tanggung jawab kepada pihak sekolah untuk mengoptimalkan hasil pendidikan dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Tujuh prinsip pengelolaan dana BOS yaitu:

1. Swakelola dan partisipatif

Pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan secara swakelola, yang artinya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, melibatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat terlibat aktif dalam memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partisipasi dari warga sekolah dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan rasa tanggung jawab, yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi dan dedikasi yang diberikan. Semua pihak terkait, termasuk kepala sekolah, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat, diharapkan turut berperan aktif dalam operasional sekolah. Hal ini dikarenakan partisipasi dianggap sebagai suatu kewajiban, mengingat sekolah perlu terus berkembang dan dapat berdiri sendiri secara finansial. Meskipun demikian, perlu adanya pembagian dan pembatasan dalam

bentuk kontribusi dan partisipasi setiap unsur agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

2. Transparan

Pelaksanaan manajemen sekolah harus dilakukan secara transparan agar para pihak yang terlibat dapat mengetahui tahap dan hasil dari pengambilan keputusan untuk mengatur kebijakan sekolah. Keterbukaan dalam manajemen memungkinkan untuk tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan dari pihak-pihak terkait terhadap citra sekolah yang positif. Transparansi di sini dianggap sebagai suatu prinsip yang memastikan ketersediaan akses untuk mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan sekolah. Informasi ini melibatkan aspek kebijakan, rangkaian pembuatan keputusan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah diraih. Keterbukaan tersebut harus dibangun berdasarkan prinsip kebebasan akses informasi yang bersifat langsung dan terbuka kepada warga sekolah dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memberikan kritik, saran, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sekolah.

3. Akuntabel

Prinsip akuntabilitas dalam konteks pendidikan mengacu pada tanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsep pendidikan yang bersifat akuntabel, menurut Nanang Fatah, melibatkan beberapa aspek, antara lain memiliki tujuan yang jelas, kegiatan yang dapat diawasi, hasil yang efektif, pencapaian tujuan, proses pencapaian yang efisien, serta menerapkan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan. Akuntabilitas sekolah, sebagai bagian dari sektor publik, diharapkan untuk bertanggung jawab baik secara horizontal maupun vertikal. Artinya, sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan atas kegiatan dan hasilnya kepada pemangku kepentingan seajar (horizontal) seperti masyarakat, orang tua siswa, dan sekaligus kepada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) seperti instansi pemerintah dan otoritas pendidikan setempat.

4. Demokratis

Demokratisasi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat tercapai apabila semua informasi yang penting dapat diakses oleh para pemimpin sekolah dan elemen-elemen terkait, sehingga mereka dapat memahami arah pengembangan, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan memahami langkah-langkah yang sedang atau akan dilakukan. Dengan adanya akses tersebut, mereka dapat melakukan analisis, pemahaman, kritik, serta memberikan masukan dan kontribusi untuk mendukung keberhasilan program sekolah. Prinsip demokratisasi di sini menciptakan lingkungan di mana keputusan dan informasi tidak hanya tersentral di tangan sedikit orang, melainkan dapat diakses dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terlibat. Hal ini mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara efektif terhadap perkembangan dan keberhasilan program sekolah.

5. Efektif dan efisien

Kegiatan yang dijalankan oleh sekolah dengan alokasi dana minimal namun menghasilkan pencapaian yang baik dapat disebut efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi dalam konteks ini mencerminkan tercapainya tugas pokok dan tujuan sekolah, pemenuhan target sesuai waktu yang ditentukan, serta partisipasi aktif dari seluruh anggota sekolah. Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan dan tugas pokok sekolah dapat dicapai, sementara efisiensi menekankan pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, suatu kegiatan dianggap efektif jika mencapai hasil yang diinginkan, dan efisien jika dapat mencapainya dengan meminimalkan penggunaan sumber daya. Terlebih lagi, keterlibatan aktif dari seluruh anggota sekolah juga menjadi bagian integral dari konsep efektivitas dan efisiensi.

6. Tertib administrasi dan pelaporan

Administrasi dalam pengelolaan dana BOS memiliki tujuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang pengalokasian dana ke kegiatan sekolah. Tujuan spesifik dari pelaporan keuangan yaitu:

- Penyediaan informasi untuk membantu penilaian kegiatan yang diselenggarakan
- Penyediaan informasi untuk membantu penilaian manajer operasional melakukan tugasnya
- Penyediaan informasi akan sumber daya, kewajiban, serta sumberdaya organisasi
- Penyediaan informasi mengenai kinerja dalam satu periode
- Penyediaan informasi tentang pembelanjaan kas, dan hal lain yang berkaitan dengan pencairan dana organisasi
- Pelaporan keuangan wajib mencakup penjelasan serta interpretasi untuk membantu memahami informasi yang ada

7. Saling percaya

Kepercayaan dalam konteks ini mengacu pada keyakinan orang tua siswa terhadap kepala sekolah dalam pengembangan program sekolah yang dianggap ideal dan diinginkan. Orang tua diharapkan dapat meyakini kemampuan kepala sekolah untuk mengorganisir dan melaksanakan program tersebut dengan baik. Kepercayaan ini mencakup keyakinan terhadap integritas, kompetensi, dan kemampuan kepala sekolah untuk menjalankan tugasnya. Dalam konteks manajemen dana, kepercayaan tersebut juga mencerminkan harapan bahwa pengelolaan dana yang baik oleh kepala sekolah akan memberikan dampak positif pada pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Kepercayaan orang tua terhadap pengelolaan dana secara transparan, akuntabel, dan efisien diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Sebaliknya, kekurangan kepercayaan dapat membawa dampak negatif terhadap pelibatan orang tua dan dukungan terhadap program-program sekolah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diwajibkan untuk mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 tahun 2021 mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana BOS untuk sekolah reguler, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat fenomena di mana masih banyak sekolah yang belum menerapkan sistem pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan ini dapat diatribusikan pada kurangnya pengendalian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap proses penatausahaan dana BOS yang dilakukan oleh bendahara. Kelemahan ini muncul akibat kurangnya informasi mengenai akuntabilitas dana BOS oleh pihak sekolah, sehingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tidak transparan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat masalah ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, yang mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Kedua masalah ini harus menjadi fokus evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan dana. Pengelolaan dana BOS yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan program tersebut. Adanya laporan penggunaan dana BOS yang tidak dipublikasikan dan tidak di audit oleh akuntan menunjukkan bahwa kesadaran sekolah terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman sekolah mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS secara tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan dari program BOS pada tingkatan SD/SDLB/SMP/SMPLB ini adalah untuk:

- 1) Membantu pendanaan biaya operasional baik non personal maupun personal sekolah.
- 2) Membebaskan siswa dari pungutan biaya.
- 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah.
- 3) Meringankan beban orangtua siswa tidak mampu. Dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pengelolaan dana BOS, strategi yang dapat dilakukan yaitu:
 1. Penyusunan rencana penggunaan dana: Satuan pendidikan harus merencanakan pengalokasian dana BOS dengan baik dan melibatkan identifikasi kebutuhan dari yang paling dibutuhkan seperti pengadaan buku dan media pembelajaran, pengembangan kurikulum dan pelatihan guru, dan faktor lain yang mempengaruhi pembelajaran.
 2. Peningkatan kualitas pendidik: Dana BOS sebagian besar bisa dialokasikan pada program pelatihan dan pengembangan guru yang mencakup pelatihan metode pembelajaran terkini,

penggunaan TPACK, atau kompetensi lain yang diperlukan untuk mengembangkan pembelajaran. Guru yang memiliki keterampilan tinggi dan berkualitas pasti mampu untuk menyediakan pembelajaran yang berkualitas pada siswa dan mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia.

3. Peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana: Dana BOS dapat dialokasikan untuk pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana di sekolah yang akan mampu mendukung pembelajaran siswa agar lebih kondusif, dan berkualitas.
4. Pembelian bahan ajar dan sumber belajar: Pengadaan buku-buku, media pembelajaran, alat pembelajaran, perangkat lunak edukasi dan alat lain yang dapat mendukung pembelajaran dapat dibeli menggunakan dana BOS.
5. Pengembangan kurikulum: Satuan pendidikan dapat menggunakan dana bos untuk pengembangan dan penyempurnaan kurikulum agar lebih relevan, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa.
6. Mendorong partisipasi: Penggunaan dana bos dalam mendorong partisipasi siswa dan orang tua dalam kegiatan pendidikan seperti pengembangan karakter, ekstrakurikuler, dan lomba.

Penggunaan dana BOS harus dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas sekolah, guru, dan siswa, sehingga dapat mencapai mutu sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Proses pengalokasian dana BOS perlu diawasi secara ketat dan dilaporkan secara transparan guna mencegah terjadinya kekeliruan yang dapat memiliki dampak besar pada masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Pendidikan memainkan peran krusial dalam pembangunan suatu negara. Investasi yang baik dari pemerintah di bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka peluang pekerjaan, dan menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi berkelanjutan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi aspek penting dalam suatu instansi pendidikan. Pengelolaan dana BOS yang transparan, akuntabel, dan efisien diperlukan agar dana tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, terutama dalam peningkatan fasilitas, sarana prasarana, kualitas pengajaran, dan kesejahteraan sekolah, yang pada gilirannya berpengaruh pada peningkatan mutu sumber daya manusia. Penyaluran dana BOS yang adil dan tepat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program ini. Pemerintah di bidang pendidikan harus mampu memastikan proses penyaluran dana BOS berjalan dengan efisien dan tanpa hambatan yang berlebihan. Mekanisme pengawasan dan evaluasi perlu ditingkatkan agar dana tersebut terbukti memberikan dampak signifikan dalam peningkatan mutu sekolah. Dengan optimalisasi pendidikan, pengelolaan, dan penyaluran dana BOS, masyarakat dapat membangun dasar yang kokoh untuk masa depan yang lebih cerah bagi seluruh anak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, A. (2020). *IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Aini, H. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Budgeting dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 5 Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Aklima, P. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Amri, U. (2021). Pengaruh biaya pendidikan terhadap keputusan memilih lembaga pendidikan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2355-22610.
- Aslindah, A., & Mulawarman, W. G. (2022). Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan yang Efektif. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan (JIMPIAN)*, 2(2), 65- 74.
- Asrol, L. D., & Yahya, H. (2022). Penerapan Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana Bos

- Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Ability: Journal of Education and Social Analysis*, 79-89.
- Djaelani, N. (2018). Analisis pengelolaan dana pendidikan di lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Studi Kasus: Program Pendidikan Sekolah SMART Ekselesia (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah).
- Fitri, A. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Hidayat, R., & Suryono, A. (2014). Implementasi kebijakan penggunaan dana bos dan laporan keuangan BOS. *Reformasi*, 4(1).
- Mardiyah, A., & Manulang, R. (2020). KEMISKINAN: Permasalahan dan Alternatif Kebijakan.
- Murdiati, R. (2013). PENGARUH BIAYA PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN GURU TERHADAP INOVASI PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA BANJAR. *Administrasi Pendidikan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana*, 1(2), 211-220.
- NASSA, G. S. I. (2022). ANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA SMAN 3 PALOPO (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *PEMA (JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 3(2), 75-80.
- Nupus, S. H. (2021). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bos (Studi Kasus Pada Seluruh SMP/MTsN Di Kabupaten Aceh Tenggara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Pratiwi, D. A., & Muazansyah, I. (2021). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 11(1), 21-31.
- Putri, R. I. T. Penerapan Manajemen Keuangan di SD Pembangunan Jaya Bintaro (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rahayu, A., & Setianingsih, E. L. (2017). Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 226-239.
- Rahayu, S. (2020). Penganggaran dana bantuan operasional sekolah: perspektif new institutional sociology. Penerbit Peneleh.
- Rudi, R. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bos Di SMP Nurul Azizi Medan. *ALACRITY: Journal of Education*, 33-41.
- Rumainur, R, Julaiha, S, & Marzuqi, A (2020). Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda., repository.uinsi.ac.id, <<https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/2067>>
- Saifrizal, M., & Yusuf, Y. (2023). PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BOS REGULER DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 6 TAHUN 2021 DI KOTA LHOKSEUMAWE. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 1039-1047.
- Sembiring, H. A. Z., & Prana, R. R. (2023). The Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Guna Menilai Kinerja Keuangan Sekolah Dasar. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 233-241.